

PENGARUH PEMINDAHAN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PERKEMBANGAN PERKOTAAN BOYOLALI

Fitria Nur Rohmah^{1*} dan *Bakti Setiawan*¹

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Submisi:30-07-2018; Revisi: 20-09-2018; Diterima: 24-09-2018

ABSTRACT

The goal of movement was to improve the service through placing the governmental office area in one integrated location. Furthermore for spatial context it would be highly expected to be the instrument of urban development as well as to trigger the establishment in the expansion area. According to Urban Spatial Detailed Planning (RDTR) of Boyolali Year 2012 – 2032, the new location was the expansion of Boyolali City which included part of Mojosongo District covering Kemiri Sub-district, Mojosongo Sub-District and Kragilan Village. Those mentioned administrative regions were capable to be developed. This research aimed to identify the movement impact of governmental office area towards the development of Boyolali urban area. The methodologies being used in this study were deductive quantitative with the comparison between the condition of former and current governmental office area. The analysis was conducted with quantitative descriptive method and spatial descriptive. This study proved that the movement of governmental office area gave the impact in developing the urban area. The impact began with the land-use change from agriculture turning into the settlement, trade and service, and industrial areas, also gave the transformation for the accessibility improvement such as the addition of road network and the increment of land price. The result of analysis towards existing land-use in 2018 with land-use zonation according to RDTR Boyolali Urban Area 2012-2032 (map zonation and text) found out that there was deviation in the usage of green open space and industrial area. That issue showed that the urban development should have been included the instrumental implementation in case of controlling the space utilization for liveable city.

Keywords: *Office area relocation; Urban development; Liveable city.*

ABSTRAK

Tujuan utama pemindahan kawasan perkantoran secara pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan membangun kawasan perkantoran yang terpadu, sedangkan secara spasial diharapkan menjadi instrumen perkembangan kota yaitu memicu pembangunan di kawasan perluasan perkotaan. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Boyolali Tahun 2012 – 2032, lokasi baru kawasan perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan daerah perluasan perkotaan Boyolali meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Mojosongo yaitu di Kelurahan Kemiri, Kelurahan Mojosongo, dan Desa Kragilan yang strategis untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pemindahan kawasan perkantoran terhadap perkembangan perkotaan Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif kuantitatif yang bersifat komparasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemindahan lokasi pemerintahan. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dan

*Corresponding author: fitria.nur.r@ugm.ac.id

Copyright © 2018 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

deskriptif spasial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemindahan kawasan perkantoran memicu perkembangan perkotaan ditandai dengan perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian tegalan menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta daerah industri, peningkatan aksesibilitas berupa penambahan jaringan jalan dan kenaikan harga lahan. Hasil analisis penggunaan lahan eksisting tahun 2018 dengan zonasi peruntukan lahan berdasarkan RDTR Kawasan Perkotaan Boyolali 2012 - 2032 (zonasi peta dan teks) menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perkotaan harus disertai dengan implementasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota yang layak huni (*liveable city*).

Kata Kunci: *Pemindahan kawasan perkantoran; Perkembangan perkotaan; Liveable city.*

PENGANTAR

Kebijakan pemindahan kawasan perkantoran pemerintah secara spasial bertujuan untuk memicu perkembangan perkotaan suatu wilayah. Alternatif pemindahan pusat pemerintahan dapat menjadi strategi dan awal kemunculan kota baru (*new town*) di daerah tujuan. Salah satu yang dapat memicu perkembangan kota baru ialah dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan baru, salah satunya dengan melakukan pemindahan pusat pemerintahan. Perkembangan kota baru ditandai dengan terjadinya perubahan struktur ruang wilayah.

Pemindahan kawasan perkantoran pemerintah terjadi di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali yang semula berlokasi di Kecamatan Boyolali dipindahkan ke Kecamatan Mojosongo yang berada di timur Kecamatan Kota Boyolali yang berjarak 4-5 km. Pemindahan tersebut didasarkan pada citra kantor Bupati (Setda) sebagai pusat pemerintahan kurang tegas karena terletak pada lokasi yang tidak mudah dikenali dan tidak berada pada jalur utama. Selain itu, kantor-kantor pemerintahan yang menjadi basis pelaksanaan pemerintahan di daerah maupun unsur-unsur penunjangnya serta tempat pelayanan kepada masyarakat

lokasinya tersebar sehingga menurunkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Boyolali Tahun 2012-2032, lokasi baru kawasan perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan daerah perluasan perkotaan Boyolali meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Mojosongo yaitu di Kelurahan Kemiri, Kelurahan Mojosongo, dan Desa Kragilan yang strategis untuk dikembangkan. Sebelum adanya pemindahan pusat pemerintahan, secara fisik Kecamatan Mojosongo dapat dikatakan sebagai daerah *hinterland* karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Boyolali yang merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan sebelumnya. Setelah pemindahan pusat pemerintahan, tentunya Kecamatan Mojosongo diharapkan dapat menjadi pusat kota baru di Kabupaten Boyolali sehingga terjadi peningkatan hierarki wilayah dari daerah pinggiran menjadi perkotaan.

Perubahan struktur ruang wilayah ditandai dengan adanya gejala-gejala perubahan pemanfaatan ruang dari pemanfaatan ruang perdesaan seperti pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian bergeser ke arah pemanfaatan ruang perkotaan seperti perdagangan dan jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pemindahan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap perkembangan perkotaan Boyolali dan mengidentifikasi kesesuaian perkembangan perkotaan yang terjadi terhadap RDTR Kawasan Perkotaan Boyolali Tahun 2012 - 2032.

Bintarto (1989) menyatakan bahwa suatu kota dapat dikatakan cepat perkembangan dan pertumbuhannya apabila penambahan penduduknya baik pertambahan alamiah maupun migrasi dari tahun ke tahun memperlihatkan pelonjakan yang cukup signifikan. Walaupun demikian pertambahan penduduk yang signifikan ini tidak selalu terjadi setiap tahunnya. Pertambahan yang signifikan mungkin hanya terjadi apabila ada faktor penyebabnya yang juga bertambah secara signifikan sehingga mendorong pertambahan penduduk yang datang pada kota tersebut. Branch (1995) mengelompokkan unsur-unsur

yang mempengaruhi perkembangan kota menjadi 3 (tiga) aspek perkembangan sebagai berikut: (1) Aspek fisik, meliputi: topografi, bangunan-bangunan, jalur transportasi dan jaringan utilitas kota, ruang terbuka, kepadatan perkotaan, pengaruh iklim, vegetasi dan perancangan perkotaan. (2) Aspek sosial, meliputi: besaran jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk aktivitas keruangan, dan perubahan jumlah penduduk. (3) Aspek ekonomi, meliputi: ekonomi pemerintah, swasta, dan khusus.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemindahan lokasi pemerintahan menggunakan data tahun

2007-2012 dan tahun 2013-2018. Lokasi dalam penelitian ini Kelurahan Kemiri, Kelurahan Mojosongo, dan Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan ruang akibat relokasi pusat pemerintahan. Identifikasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan penggunaan lahan eksisting tahun 2018 dengan peruntukan lahan berdasarkan zonasi peta dan teks dalam RDTR Kawasan Perkotaan Boyolali. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif spasial. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data Kecamatan dalam angka yang diperoleh dari BPS.

Variabel yang digunakan dalam pengukuran perkembangan kota disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Analisis

Tujuan	Variabel	Indikator	Analisis
Identifikasi perkembangan perkotaan	Perkembangan fisik perkotaan	Perubahan penggunaan Lahan	Analisis Spasial
		Penambahan Jaringan jalan	
	Sarana dan Prasarana	Penambahan Fasilitas Perdagangan	Analisis Deskriptif Komparatif
Harga Lahan	Peningkatan Harga Lahan		
Identifikasi kesesuaian perkembangan perkotaan	Kesesuaian penggunaan lahan dengan RDTR	Peta penggunaan lahan	Analisis spasial berdasarkan zonasi peta dan teks
		Aturan zonasi penggunaan lahan	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Penggunaan Lahan

Perkembangan perubahan penggunaan lahan sebelum dan sesudah pemindahan kawasan perkantoran disajikan dalam Gambar 1. Pada rentang waktu sebelum pemindahan yaitu pada tahun 2007 - 2012, perubahan penggunaan lahan paling tinggi yaitu pada jenis penggunaan lahan permukiman dari luasan

155,93 hektar menjadi 190 hektar. Sedangkan luasan pertanian tegalan mengalami konversi seluas 52,81 hektar. Hal ini menunjukkan tingkat perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian tegalan menjadi permukiman cukup tinggi. Perkembangan luasan penggunaan lahan di Kecamatan Mojosongo dalam rentang waktu sebelum dan setelah pemindahan dapat dilihat dalam tabel 2.

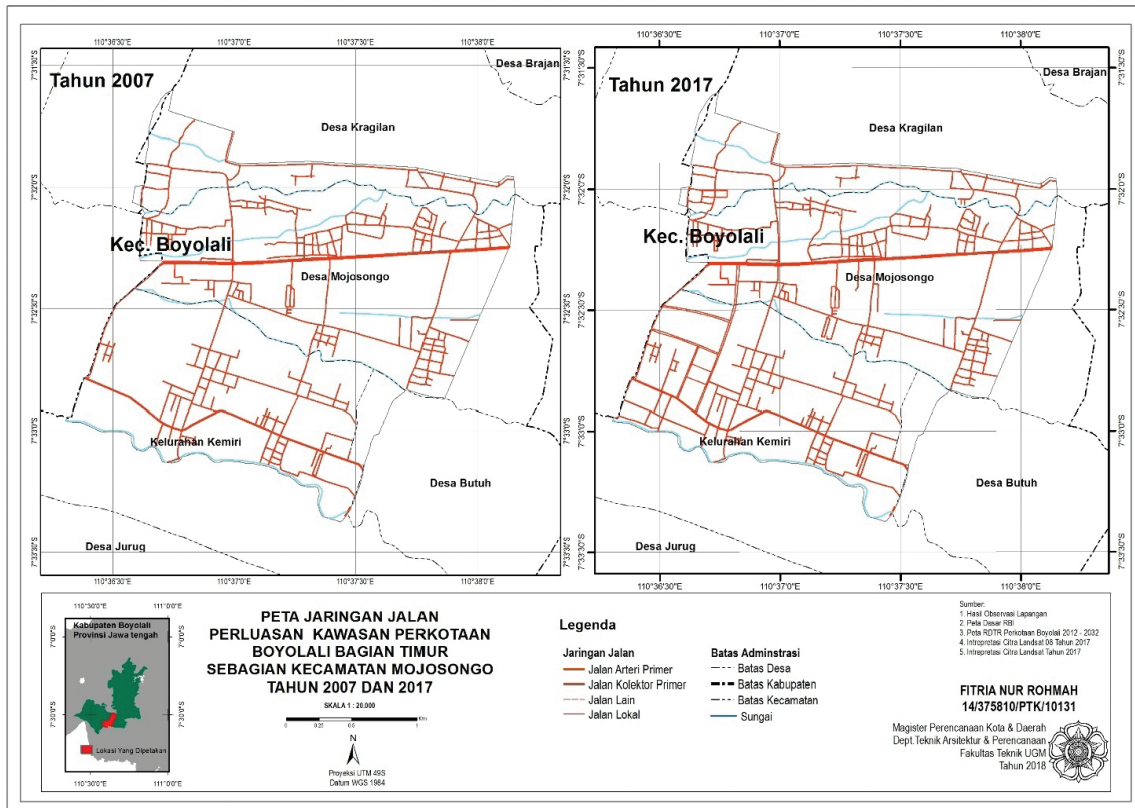
Tabel 2.
Perkembangan Luasan Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan Perkotaan Boyolali

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (ha)					
		2007	2012	Perubahan	2012	2018	Perubahan
1	Pertanian Tegalan	430,99	378,18	-52,81	378,18	318,68	-59,50
2	Permukiman	155,93	190,00	34,07	190,00	193,17	3,17
3	Industri	2,53	8,64	6,10	8,64	15,64	7,01

Perkembangan Jaringan Jalan

Hasil analisis peta dalam gambar 2 dan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga tahun 2012 tidak terdapat penambahan jalan, baik jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan

lokal. Sedangkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 terdapat penambahan panjang jalan pada klas/fungsi jalan kolektor dan jalan lokal. Keadaan perubahan jalan secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 3.



Gambar 2.

Peta Perkembangan Jaringan Jalan Tahun 2007 dan 2017 di Wilayah Perluasan Perkotaan Boyolali

Tabel 3.

Peningkatan Jalan di Wilayah Perluasan Perkotaan Boyolali

Klas/fungsi jalan	2007 (km)	2012 (km)	2018 (km)	Keterangan
Arteri Primer	7,69	7,69	7,69	Jalan Solo-Semarang, Jalan Boyolali-Klaten
Kolektor Primer	1,06	1,06	6,78	Jalan Lingkar Timur Boyolali, Jalan Kawasan Perkantoran Kabupaten Boyolali
Lokal	41,35	41,35	46,09	Jalan dalam kota/desa

Peningkatan jalan yang terjadi di Wilayah Perluasan Perkotaan Boyolali pada tahun 2012 - 2018 ditemukan adanya hubungan antara pemindahan perkantoran pemerintah dengan jaringan jalan. Pertambahan klas/fungsi jalan paling tinggi yaitu pada klas/

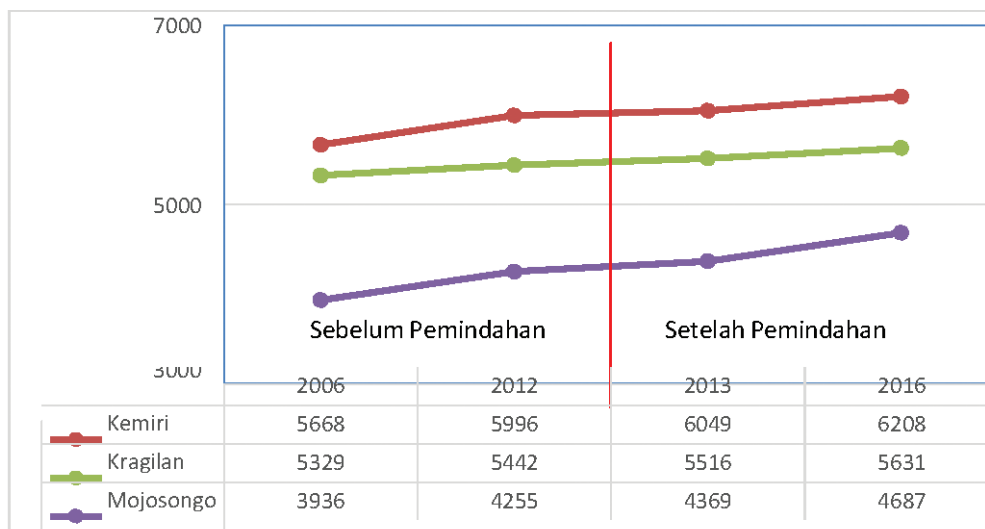
fungsi jalan kolektor primer dari 1,06 km pada tahun 2012 menjadi 6,78 km pada tahun 2018 atau mengalami perkembangan sepanjang 5,72 km. Pertambahan klas/fungsi jalan Kolektor Primer berada di Kawasan Perkantoran Kabupaten Boyolali. Sedangkan jalan lokal

mengalami penambahan sebesar 4,74 km yang tersebar pada jalan di kawasan permukiman perumahan perumahan.

Kependudukan

Jumlah penduduk di Kelurahan Kemiri, Desa Kragilan dan Kelurahan Mojosongo,

Kecamatan Mojosongo dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kelurahan Kemiri, Desa Kragilan dan Kelurahan Mojosongo.



Gambar 3.
Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sebelum adanya pemindahan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk setelah pemindahan. Data migrasi masuk dan migrasi keluar,

baik sebelum terjadinya pemindahan lokasi pemerintahan maupun sesudah terjadinya pemindahan lokasi pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Data Migrasi Masuk dan Keluar di Kecamatan Mojosongo Sebelum dan Sesudah Pemindahan Kawasan Perkantoran Kabupaten Boyolali

Kelurahan / Desa	Sebelum				Sesudah			
	Pertumbuhan Penduduk	Migrasi In	Migrasi Out	Pertumbuhan Harga Lahan	Pertumbuhan Penduduk	Migrasi In	Migrasi Out	Pertumbuhan Harga Lahan
Kemiri	43	16	21	11,92	73	96	61	14,00
Kragilan	-2	2	19	7,12	16	72	48	12,1
Mojosongo	15	20	19	5,59	135	206	109	11,41

Perubahan yang sangat mencolok dapat dilihat, baik dari data migrasi masuk maupun data migrasi keluar pada ketiga desa tersebut.

Pemindahan lokasi pemerintahan banyak memberikan motif kepada penduduknya untuk melakukan mobilitas bagi penduduk di

ketiga desa tersebut. Proses demografi sebelum dan sesudah pemindahan lokasi pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

Proses Demografi di Kecamatan Mojosongo
Sebelum dan Sesudah Pemindahan
Kawasan Perkantoran Kabupaten Boyolali

Kelurahan/Desa	Sebelum	Sesudah
Kemiri	43	73
Kragilan	-2	16
Mojosongo	15	135

Perubahan jumlah penduduk yang signifikan terjadi pada Kelurahan Mojosongo. Penambahan penduduk di Kelurahan Mojosongo banyak dipengaruhi oleh migrasi masuk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemindahan lokasi pemerintahan, memunculkan daya tarik bagi sebagai lokasi tujuan migrasi dengan berbagai motif,

seperti perpindahan penduduk dengan motif politis, perpindahan penduduk dengan motif peningkatan status sosial, maupun perpindahan penduduk dengan motif ekonomi.

Aspek Ekonomi

Keberadaan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Boyolali di daerah yang baru mendorong kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan tersebut berkembang. Jenis usaha perdagangan dan jasa yang banyak berkembang pada kawasan tersebut di antaranya adalah Kelompok Pertokoan, Pasar, Toko/Warung/Kios, Restoran/Rumah Makan/Kedai, Hotel/Penginapan, SPBU, dan usaha Photo Copy. Untuk mengetahui perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah adanya pemindahan kawasan perkantoran dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6.

Perkembangan Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo tahun 2006 – 2016

Jenis Fasilitas	Sebelum Pemindahan (2006-2012)			(Setelah Pemindahan (2013-2016)		
	Tingkat Pertumbuhan (%)			Tingkat Pertumbuhan (%)		
	Kemiri	Mojosongo	Kragilan	Kemiri	Mojosongo	Kragilan
Kelompok Pertokoan	-	-	-	1	-	1
Pasar	-	-	-	-	-	-
Toko/Warung/Kios	-4,47	-1,94	4,91	31,80	18,32	17,37
Restoran/Rumah Makan/ Kedai	41,42	5,08	10,87	16,81	21,00	6,78
Hotel Penginapan	1,12	1,12	-	1,00	-100,00	-
SPBU	-	-	-	-	-	-
Photo Copy	20,09	-	12,25	10,06	-14,50	0,00

Perkembangan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa di Kelurahan Mojosongo cenderung mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada rentang waktu setelah pemindahan kawasan perkantoran yaitu untuk jenis fasilitas toko/warung/kios sebesar 18,32% dan restoran/rumah makan/kedai sebesar 21%. Tingkat pertumbuhan untuk jenis fasilitas toko/warung/kios dalam

rentang waktu setelah pemindahan adalah sebesar 17,37% atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada rentang waktu sebelum pemindahan. Sedangkan tingkat pertumbuhan untuk jenis fasilitas restoran/rumah makan/kedai mengalami penurunan angka pertumbuhan sebesar 4,09% pada rentang waktu sebelum pemindahan dan setelah pemindahan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Boyolali.

Harga Lahan

Pada umumnya harga lahan di daerah perkotaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga halnya dengan harga lahan yang ada di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali yang masuk dalam Kawasan Perkotaan Boyolali. Persentase pertumbuhan harga lahan di wilayah perluasan Perkotaan Boyolali disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7.
Persentase Pertumbuhan Harga Lahan

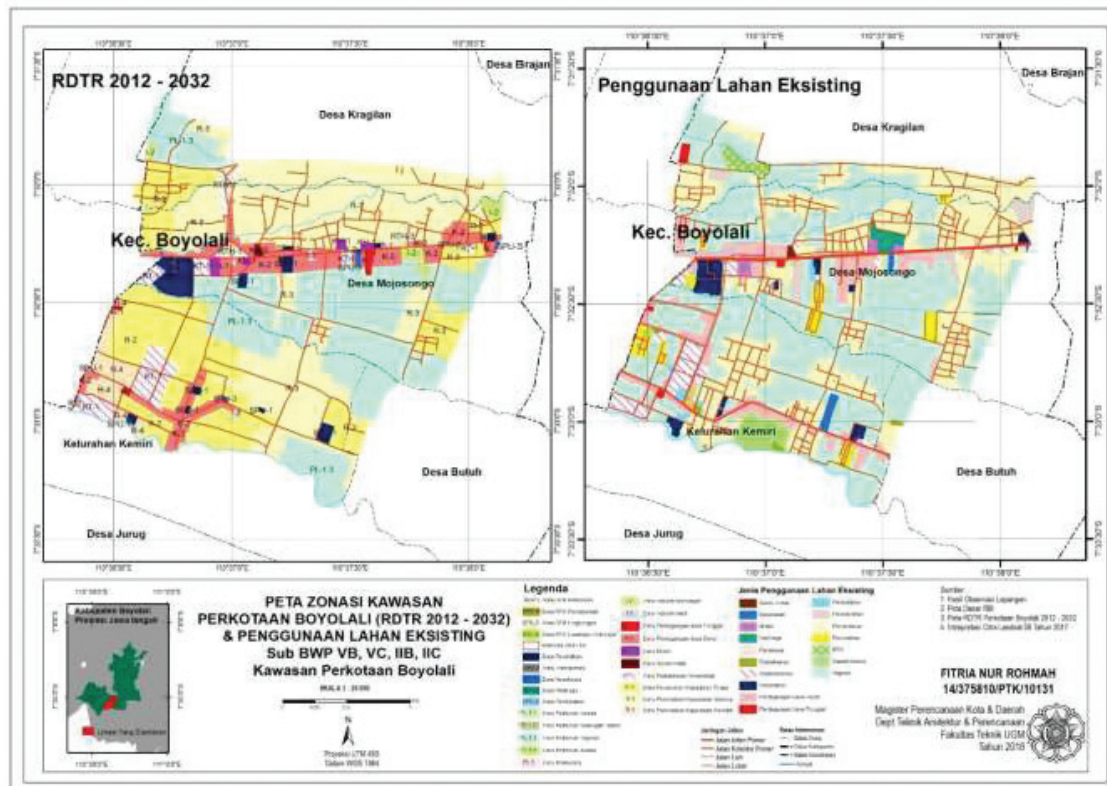
Desa/ Kelurahan	Pertumbuhan 2008-2013 (%)	Pertumbuhan 2013-2018 (%)
Kemiri	11,92	14,00
Mojosongo	7,12	12,1
Kragilan	5,59	11,41

Persentase pertumbuhan harga lahan tertinggi berada di Kelurahan Kemiri terutama di lokasi kawasan perkantoran pemkab Boyolali. Perubahan penggunaan lahan di

daerah tersebut menyebabkan kenaikan harga lahan yang pesat. Harga lahan tertinggi dari ketiga desa/kelurahan berada di Kelurahan Mojosongo karena lokasi ini terletak pada jalur antar kota yang sangat strategis di jalan arteri primer yang menghubungkan Solo-Semarang. Harga lahan tertinggi di lokasi ini mencapai Rp1.700.000,00/m² dengan rasio pertumbuhan sebesar 6,33% pada rentang tahun 2013-2018.

Kesesuaian terhadap RDTR

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Boyolali 2012 - 2032 di daerah perluasan di Kecamatan Mojosongo, zonasi peruntukan lahan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Perbandingan antara penggunaan lahan berdasarkan zonasi peta RDTR dan penggunaan lahan eksisting tahun 2018 disajikan dalam Gambar 4 dan Tabel 8.



Gambar 4.
Peta Perbandingan Zonasi Kawasan Perkotaan Boyolali dan Penggunaan Lahan Eksisting 2018

Tabel 8.
Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2018 dengan Zonasi Peta RDTR
Kawasan Perkotaan Boyolali 2012 - 2032

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Berdasarkan RDTR		Eksisting		Penyimpangan	
		Luasan (ha)	Luasan (%)	Luasan (ha)	Luasan (%)	(ha)	(%)
Zona Lindung							
1	RTH	8,97	1,44	7,09	1,14	-1,88	-0,30
Sub Total		8,97	1,44	10,62	1,71		
Zona Budidaya							
1	Industri	7,11	1,14	15,64	2,51	8,53	1,37
2	Perdagangan	46,31	7,44	47,40	7,62	1,09	0,18
3	Militer	2,39	0,38	2,39	0,38	0,00	0,00
4	Gardu Induk	0,65	0,10	0,65	0,10	0,00	0,00
5	Perkantoran Pemerintah	21,19	3,41	17,00	2,73	-4,19	-0,67
6	Pertanian Tegal	168,04	27,01	319,30	51,32	151,26	24,31
7	Permukiman	352,24	56,61	193,17	31,04	-159,07	-25,57
8	Pendidikan	14,30	2,30	10,30	1,66	-4,00	-0,64
9	Kesehatan	0,90	0,14	2,62	0,42	1,72	0,28
10	Peribadatan	0,12	0,02	3,12	0,50	3,01	0,48
11	Sarana Olahraga	0	0	3,53	0,57	3,53	0,00
Sub Total		613,25	98,56	611,60	98,29		
Total		622,22	100,00	622,22	100,00		

Tabel 7 menunjukkan bahwa luas keseluruhan daerah perluasan Kawasan Perkotaan Boyolali bagian timur di Kecamatan Mojosongo adalah seluas 622,22 hektar, terdiri atas peruntukan lahan Zona Lindung dan Zona Budidaya. Dari analisis luasan dalam tabel dapat diketahui bahwa terdapat penggunaan lahan eksisting yang tidak diatur dalam Zonasi Peruntukan Lahan yaitu peruntukan sarana olahraga seluas 3,53 hektar.

Hasil analisis perbandingan penggunaan lahan eksisting tahun 2018 dengan peta zonasi peruntukan lahan sesuai RDTR 2012-2032 dapat diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian luasan penggunaan lahan berdasarkan peruntukannya. Luasan penggunaan lahan yang sudah melebihi target RDTR adalah penggunaan lahan untuk industri, perdagangan, pertanian tegalan, sarana kesehatan, peribadatan, dan olahraga. Ketidaksesuaian atau penyimpangan untuk kawasan industri adalah seluas 8,53 hektar, kawasan perdagangan seluas 1,09 hektar, pertanian tegalan seluas 151,26 hektar,

sarana kesehatan seluas 1,72 hektar, sarana peribadatan seluas 3,01 hektar, dan sarana olahraga seluas 3,53 hektar. Hasil analisis zonasi teks dari hasil analisis dengan zonasi peta menunjukkan bahwa ketidaksesuaian yang termasuk dalam kategori penyimpangan adalah penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau dan industri.

Secara keseluruhan penyimpangan yang terjadi sampai dengan penelitian ini dilakukan masih dalam skala yang tidak terlalu luas, tetapi tetap perlu diperhatikan. Pemandangan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Boyolali ini telah membentuk sebuah kawasan hunian/permukiman baru di sekitarnya yang diharapkan dapat berkesinambungan dengan tetap menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman.

Perwujudan kota yang layak huni (*liveable city*) dapat menjadi tujuan lain selain menciptakan kawasan perkotaan baru di Boyolali. Perencanaan penggunaan lahan di kawasan ini perlu ditinjau ulang terutama untuk mengantisipasi penyimpangan

penggunaan lahan dan agar tujuan pembentukan kawasan perkotaan yang layak huni dapat berkesinambungan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemindahan kawasan perkantoran memicu perkembangan perkotaan ditandai dengan perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian tegalan menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa serta daerah industri. Selain itu perkembangan perkotaan juga ditunjukkan dengan peningkatan aksesibilitas berupa penambahan jaringan jalan dan kenaikan harga lahan. Hasil analisis penggunaan lahan eksisting tahun 2018 dengan zonasi peruntukan lahan berdasarkan RDTR Kawasan Perkotaan Boyolali 2012 – 2032 (zonasi peta dan teks) menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perkotaan harus disertai dengan implementasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni (*livable city*).

DAFTAR PUSATAKA

- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa dan Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Branch, Melville. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*, Terjemahan oleh Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Morril, R.L. 1974. *The Spatial Organization of Society, Second Edition*. United States of America: Duxbury Press.
- Muta'ali, Luthfi. 2011. *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Southworth, Michael. 2016. *Learning to Make Liveable Cities*. *Journal of Urban Design* Vol.21, No.5, 570-573. DOI: 10.1080/13574809.2016.1220152.
- Yunus, Hadi Sabar, 2005. *Manajemen Kota: Perspektif Spasial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta